



Prosedur Pengurusan Pergantian Bendera MV. Atlas Link Menjadi Bendera Indonesia di Kantor Syahbandar Belawan oleh PT. Multi Jaya Samudera Cabang Belawan

Kevin Pratama Sodipta Bancin¹, Dirhamsyah², Yuna Sutria³

¹⁻³ Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: kevinpratamasodiptab@gmail.com

Abstract. *This paper discusses the MV Flag Change Procedure. Atlas Link becomes the Indonesian flag at the Harbor Master's Office. This process aims to understand the steps from submitting an application to issuing an approval letter, as well as registration at the Directorate General of Sea Transportation. This research also identified various required documents, including bills of sale, certificates of fitness, and safety documents. In addition, this paper describes the role of the harbormaster in ensuring compliance with maritime regulations and international standards, as well as the challenges faced during the document validation process with the country of origin. In writing this paper the author used field research and library research methods, and the conclusion that can be drawn is that the procedure for changing the MV Atlas Link flag from a foreign flag to an Indonesian flag at the Belawan harbormaster's office, Medan, involves several important steps, including submitting an application, checking documents, ship inspection, validation with the country of origin, and registration at the Directorate General of Sea Transportation. During this process the harbormaster acts as an authority who ensures that all steps are carried out in accordance with applicable maritime regulations, both at the national and international level. Compliance with international standards, such as those set by the IMO, is also essential to maintain shipping safety and environmental protection, although these procedures are self-explanatory, obstacles such as difficulties in communication with the country of origin and validation of documents can affect the smoothness of the process. Therefore, proper supervision and handling is very necessary to prevent legal problems and ensure safe ship operations.*

Keywords: *change of flag, harbormaster, MV Atlas Link*

Abstrak. Makalah ini membahas tentang Prosedur Pengurusan Pergantian Bendera MV. Atlas Link menjadi bendera Indonesia di Kantor Syahbandar. Proses ini bertujuan untuk memahami langkah-langkah mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan surat persetujuan, serta pendaftaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai dokumen yang diperlukan, termasuk bill of sale, sertifikat kelayakan, dan dokumen keselamatan. Selain itu, makalah ini memaparkan peran syahbandar dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim dan standar internasional, serta tantangan yang dihadapi selama proses validasi dokumen dengan negara asal. Dalam penulisan makalah ini penulis menggunakan metode field research dan library research, dan Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Prosedur pengurusan pergantian bendera MV Atlas Link dari bendera asing menjadi bendera Indonesia di kantor syahbandar Belawan, Medan, melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, inspeksi kapal, validasi dengan negara asal, dan pendaftaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Selama proses ini syahbandar berperan sebagai otoritas yang memastikan bahwa semua langkah dilakukan sesuai dengan regulasi maritim yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan terhadap standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh IMO, juga sangat penting untuk menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan, meskipun prosedur ini cukup jelas, hambatan seperti kesulitan dalam komunikasi dengan negara asal dan validasi dokumen dapat memengaruhi kelancaran proses. Oleh karena itu, pengawasan dan penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah masalah hukum dan memastikan keselamatan operasional kapal.

Kata kunci: pergantian bendera, syahbandar, MV Atlas Link

1. LATAR BELAKANG

Prosedur pengurusan pergantian bendera kapal merupakan hal penting dalam dunia pelayaran, khususnya bagi kapal MV Atlas Link yang akan beralih dari bendera asing menjadi bendera Indonesia. Pergantian ini tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga

berkaitan dengan keamanan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. PT Multi Jaya Samudera, sebagai pemilik kapal, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pengurusan bendera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Syahbandar Belawan. Peralihan bendera ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi nasional, memfasilitasi pengoperasian kapal di perairan Indonesia, serta mendukung industri maritim dalam negeri.

Prosedur pengurusan pergantian bendera melibatkan berbagai regulasi yang harus dipatuhi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa peraturan yang relevan termasuk Undang-Undang Perkapalan: Menjelaskan syarat dan ketentuan untuk pendaftaran kapal. Konvensi Internasional: Seperti SOLAS dan MARPOL yang mengatur aspek keselamatan dan lingkungan. Regulasi ini seringkali berubah dan memerlukan pemahaman yang mendalam, sehingga menjadi tantangan bagi pemilik kapal.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Proses

Menurut Hulu (2021 :23) proses adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam. Menurut Daft (2021 :123) mendefinisikan proses sebagai urutan langkah – langkah yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk pembuatan produk atau penyediaan layanan

Pengertian Sertifikat

Menurut Suryanto (2020:27) Sertifikat merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan untuk menyatakan bahwa individu telah memenuhi syarat atau standar tertentu yang telah ditetapkan, sertifikat sering kali dibutuhkan dalam proses perizinan sektor atau akreditasi sektor.

Pengertian Kapal

Menurut Undang Undang NO 17 Tahun 2008 pengertian Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka di perpustakaan Poltek AMI Medan untuk mengumpulkan data teoritis. Kegiatan ini mencakup pengumpulan berbagai buku dan artikel, pencocokan istilah lapangan dengan kamus maritim, serta pencarian informasi yang relevan dengan topik makalah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis melakukan observasi langsung di lapangan dan melakukan diskusi dengan karyawan di perusahaan tempat penulis melaksanakan Praktek Darat (Prada). Selain itu, penulis juga berkonsultasi dengan senior di PT. Multi Jaya Samudera Belawan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengurusan Pergantian Bendera Kapal Asing MV. Atlas Link menjadi Kapal Bendera Indonesia

1. Persiapan Dokumen

Sebelum melakukan proses penggantian bendera, pemilik kapal harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut :

1) Surat Permohonan

Proses penggantian bendera kapal asing menjadi bendera Indonesia dimulai dengan pengajuan surat permohonan sebelum pergantian bendera. Pemilik kapal harus mengajukan permohonan ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan melampirkan dokumen persyaratan di SIMKAPEL. Terdapat 17 dokumen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan. Setelah semua dokumen lengkap, dokumen-dokumen tersebut akan diproses melalui aplikasi SIMKAPEL. Yaitu Surat Permohonan Pergantian Bendera, Bill of sale, sertifikat kelayakan kapal, Dokumen Registrasi Kapal Asing, Surat Persetujuan Pergantian Bendera, Surat Pernyataan Pemilik, Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi, Dokumen Identitas Pemilik, Surat Penghapusan Registrasi Kapal Asing, Laporan Inspeksi Kapal, Dokumen Asuransi Kapal, Sertifikat Keselamatan, Dokumen Peralatan Keselamatan, Sertifikat Lingkungan, Dokumen Pengelolaan Limbah, Rencana Pelayaran, Dokumen Pendukung Lainnya.

2) Dokumen Identitas Perusahaan

Yaitu dengan adanya akta pendirian usaha yang dapat menunjukkan susunan direksi dan atau komposisi saham terkahir dilampirkan di Surat keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia tentang pengesahan Akta Pendirian/ Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. NPWP yang berupa nomor pokok wajib pajak yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya setiap pajak hanya berikan satu NPWP saja. KTP pemilik perusahaan PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera yaitu ktp pemilik kapal yang bertanggung jawab dalam perusahaan yang masih berlaku.

2. Inspeksi Kapal

Setelah permohonan diterima, syahbandar akan melakukan inspeksi pada kapal MV. Atlas Link untuk memastikan bahwa kapal memenuhi standar kelayakan. Inspeksi ini mencakup pemeriksaan fisik kapal, peralatan keselamatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Tujuan utama.dari inspeksi ini adalah untuk memastikan kapal memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. Rincian Inspeksi Kapal :

- 1) Pemeriksaan Fisik Kapal: Inspektur akan memeriksa kondisi fisik kapal, termasuk struktur lambung, mesin, dan sistem navigasi. Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan.
- 2) Peralatan Keselamatan: Semua peralatan keselamatan seperti pelampung, sekoci, alat pemadam kebakaran, dan perangkat penyelamatan lainnya akan diperiksa untuk memastikan bahwa semuanya tersedia dan berfungsi dengan baik.
- 3) Dokumen Pendukung: Inspektur juga akan memeriksa dokumen yang relevan, seperti sertifikat kelayakan, dokumen registrasi, dan bukti kepemilikan untuk memastikan semuanya lengkap dan sesuai.

Hasil dari inspeksi ini akan menjadi dasar untuk keputusan syahbandar dalam menerbitkan izin pergantian bendera. Jika ada kekurangan, kapal mungkin perlu melakukan perbaikan sebelum memenuhi syarat.

3. Penerbitan Surat Persetujuan

Jika MV. Atlas Link memenuhi syarat dan lulus inspeksi, syahbandar akan menerbitkan Surat Persetujuan Pergantian Bendera. Surat ini menjadi dasar bagi pemilik kapal untuk mendaftarkan kapal di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Proses Penerbitan Surat Persetujuan :

- 1) Evaluasi Hasil Inspeksi: Setelah inspeksi, syahbandar mengevaluasi hasil pemeriksaan. Jika kapal memenuhi semua syarat kelayakan dan tidak ada temuan yang signifikan, syahbandar akan melanjutkan ke langkah berikutnya.
- 2) Penerbitan Surat Persetujuan: Syahbandar kemudian mengeluarkan Surat Persetujuan Pergantian Bendera, yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi standar yang diperlukan untuk beroperasi di bawah bendera Indonesia. Surat ini mencakup: Nama kapal, Nomor registrasi, Tanggal penerbitan, Pernyataan bahwa kapal memenuhi syarat untuk beroperasi.

4. Pendaftaran Kapal

Setelah mendapatkan Surat Persetujuan, pemilik kapal wajib melakukan pendaftaran kapal di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan langkah terakhir setelah mendapatkan Surat Persetujuan Pergantian Bendera. Proses Pendaftaran Kapal sebagai berikut :

- 1) Dokumen yang Diperlukan, Surat Persetujuan Pergantian Bendera Dokumen ini menjadi bukti bahwa kapal telah lulus inspeksi dan memenuhi syarat untuk beroperasi di bawah bendera Indonesia.
- 2) Dokumen Kelengkapan Kapal, Ini mencakup dokumen seperti Bill of Sale, sertifikat kelayakan, dan dokumen identitas pemilik. Semua dokumen harus asli atau salinan yang sah.
- 3) Bukti Pembayaran Pajak dan Retribusi Pemilik kapal harus menyertakan bukti pembayaran pajak terkait, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi pendaftaran, sebagai syarat untuk mendapatkan pendaftaran.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Penggantian Bendera

Kepatuhan terhadap standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh IMO, sangat penting dalam konteks pergantian bendera kapal. Pemilik kapal perlu menyadari bahwa pergantian bendera bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal memenuhi semua regulasi keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Dengan memahami dan mematuhi regulasi ini, pemilik kapal dapat beroperasi dengan aman dan efisien di perairan internasional, sekaligus melindungi lingkungan laut.

Hambatan - Hambatan yang terjadi dalam pergantian Bendera Kapal Asing MV Atlas Link menjadi Kapal Bendera Indonesia

Beberapa kendala muncul ketika beberapa negara tidak menanggapi email yang dikirimkan, sehingga sulit memverifikasi status pendaftaran kapal di negara asalnya. Masalah lain yang sering terjadi adalah kapal-kapal dari negara asal hanya mendaftar secara sementara di negara lainnya. Dalam mengatasi hal ini, Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal mengambil langkah dengan menunda proses pergantian bendera hingga ada respon dari pemohon. Apabila tidak ada balasan, maka permohonan akan dihentikan. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penerbitan sertifikat asal yang tidak sesuai, yang dapat mengakibatkan kapal tidak layak berlayar dan berisiko mengalami kecelakaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur pengurusan pergantian bendera MV Atlas Link dari bendera asing menjadi bendera Indonesia di kantor syahbandar Belawan, Medan, melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, inspeksi kapal, validasi dengan negara asal, dan pendaftaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Selama proses ini, syahbandar berperan sebagai otoritas yang memastikan bahwa semua langkah dilakukan sesuai dengan regulasi maritim yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepatuhan terhadap standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh IMO, juga sangat penting untuk menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Meskipun prosedur ini cukup jelas, hambatan seperti kesulitan dalam komunikasi dengan negara asal dan validasi dokumen dapat memengaruhi kelancaran proses. Oleh karena itu, pengawasan dan penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah masalah hukum dan memastikan keselamatan operasional kapal.

DAFTAR REFERENSI

- Berutu, R., & Sabila, F. H. (2024). System for Management of Sign on Ship Crew Sealing Books at the Batam KSOP Office at PT. Putra Anambas Shipping Batam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(2), 256-261.
- Hulu, A. 2021. Warna Sari. Jawa Tengah: Lutfi Gilang.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2021. Pedoman Pergantian Bendera Kapal. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

- Kesuma, N., hani Sabila, F., & Chrisnatalanta, C. (2022). SISTEM PENGURUSAN SIGN ON BUKU PELAUT CREW KAPAL DI KANTOR KSOP KHUSUS BATAM PADA PT. PUTRA ANAMBAS SHIPPING BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 411-416.
- Kesuma, N., Sutria, Y., & Susilawaty, S. 2021. PERANAN AGEN DALAM PENGURUSAN IZIN MASUK KAPAL ASING DI KANTOR BADAN PENGELOLA PELABUHAN BATAM (BPPB) PADA PT. ADHIGANA PRATAMA MULYA BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 25
- Sabila, F. H., & Cahyadi, W. D. Y. (2024). Analysis of Existing Constraints During Loading and Unloading of Goods at Belawan Port by PT. Gelora Perkasa. *Applied Business and Administration Journal*, 3(03), 15-22.
- Sabila, F. H., & Rahmah, A. (2023). Pengurusan Jasa Kepelabuhanan Di Kantor BP Batam Menggunakan Sistem B-Sims Pada PT. Sukses Makmur Samudra Berjaya Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(2), 509-514.
- Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). Persiapan Peralatan dan Dokumen Sebelum Melaksanakan Aktivitas Bongkar Curah Kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509-519.
- Saragih, R. R., Ridho, S., Danilwan, Y., & Sabila, F. H. (2024). Proses Penanganan Clearance Out Kapal Ternak Berbendera Asing Dengan Inaportnet Oleh Pt. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(1), 140-146.
- Sianturi, P. S., & Sabila, F. H. (2024). The Influence Of Manual System Port Services To Inaportnet On Users Of Belawan Port Services At PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(1), 17-28.
- Suryanto, B. 2020. Standar dan Validasi Sertifikat Profesional. Bandung. Penerbit
- Sutria, Y., & Nasution, D. A. N. 2021. PENANGANAN BILL OF LADING UNTUK MUATAN CURAH CAIR DI KAPAL ASING PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG PADANG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 161-167.
- Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. 2022. Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386-393.
- Syahbandar Belawan. 2021. Prosedur Pengurusan Pergantian Bendera Kapal. [Online] Tersedia di: Website Syahbandar Belawan.
- Terry, G. R. 2021. Principles of Management. Jakarta.McGraw-Hill.